**PENGARUH KOMITMEN PIMPINAN,**

**KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, PENGENDALIAN INTERNAL**

**DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN**

**( Studi Empris Pada SKPD di Kabupaten Bantul)**

**Destriyani**

**Rochmad Bayu Utomo**

Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

***ABSTRAK***

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh komitmen pimpinan, ketidakpastian lingkungan, pengendalian interndal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Bantul. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *Convenience sampling,* yang mana sampel dipilih berdasarkan kemudahan peneliti dalam menjangkaunya. Sampel dalam penelitian ini merupakan SKPD berbentuk dinas dan BKAD, dengan responden pegawai bagian keuangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 20 dengan 80 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan survei kuesioner. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sedangkan ketidakpastian lingkungan, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul.

**Kata Kunci : Komitmen Pimpinan, Ketidakpastian Lingkungan, Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**.

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat (Afriyani, 2018).Salah satu tujuan utama adanya otonomi daerah adalah terwujudnya *Good Goverment Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik (Wintari dan Suardana, 2018). Menurut Mardiasmo (2018:19) salah satu karakteristik *good governance* yang digunakan dalam akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* adalah adanya transparansi.

Asroel (2016), mengemukakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Hal ini untuk memenuhi hak dasar masyarakat (publik) terhadap pemerintah yaitu hak untuk mengetahui *(right to know)*, hak untuk diberi informasi *(right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya *(right to be heard and to be listen t*o). Penerapan transparansi masih dibilang cukup rendah, hal ini dibuktikan dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Tahun 2017, Indonesia memperoleh skor 37 dalam *Corruption Perception Index (CPI)*, dan menempati peringkat 96 dari 180 negara yang diukur. Tahun 2018 Indonesia memperoleh skor 38 dalam *Corruption Peception Index (CPI)*, dan menempati peringkat 89 dari 180 negara yang diukur. Kemudian, pada tahun 2019 Indonesia memperoleh skor 40 dalam *Corruption Perception Index (CPI),* dan menempati peringkat 85 dari 180 negara yang diukur. Skor CPI memiliki rentang nilai 0-100. Apabila suatu negara memeroleh skor CPI pada rentang yang kecil maka dipersepsikan negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

Jogja Corruption Watch (JCW) menuturkan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi yang ditangani Polda maupun Kejati DIY sepanjang tahun 2019 cukup tinggi, nilainya sekitar Rp 23,1 miliar (Kejati DIY). Kasus pertama terungkap pada bulan Juni 2019, adanya dugaan korupsi aset tanah pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) di Kemendikbud. Kedua, pada bulan Juli 2019 terungkap kasus dugaan korupsi di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan pendidikan dan Tenaga kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta. Ketiga, pada pertengahan Juli 2019, Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan Kades Banyurejo sebagai tersangka korupsi dana desa pada tahun 2015-2016.Keempat, bulan Agustus 2019 Tim Satgas KPK melakukan OTT terhadap oknum jaksa dan pengusaha di Solo, Jawa Tengah terkait kasus suap lelang pada proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Soepomo Yogyakarta. Kelima, pada awal Desember 2019, dua pejabat Desa Banguncipto Sentolo Kulon Progo menyelewengkan dana bantuan dari Pemkab Kulonprogo dalam kurun waktu 2014-2018.

Korupsi merupakan penyebab hambatan pertumbuhan, perkembangan dan kemakmuran rakyat pada berbagai negara (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2017). Nurhadianto dan Khamisah (2019) mengemukakan bahwa :

“Korupsi dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya transparansi dalam hal laporan keuangan di suatu lembaga. Rendahnya transparansi menimbulkan suatu kondisi dimana tindakan korupsi dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, ketika transparansi dapat dilakukan maka masyarakat dapat melihat apa saja yang ada dalam laporan keuangan, sehingga sangat sulit untuk dilakukan manipulasi data”.

Penelitian yang dilakukan oleh Saingura dan Purnomo (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya meningkatkan transparansi dengan menerapkan e-goverment. Langkah ini sebagai upaya mentaati regulasi dari pemerintah pusat untuk memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi kedalam proses tata kelola pemerintah daerahnya serta sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada pemerintahan sehingga meminimalisir terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Harapannya agar masyarakat luas bisa mengakses semua data yang berkaitan dengan pemerintahan secara terbuka. E-goverment yang diterapakan oleh Kabupaten Bantul sudah berjalan cukup memuaskan dengan mencapai nilai yang baik dalam setiap indikator penelitiannya, antara lain indikator efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai upaya transparansi, Kabupaten Bantul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul telah meluncurkan aplikasi Sidat Keuda (Sistem Informasi Data Transaksi Keuangan Daerah) pada Juli 2019. Pada tahun 2019 pula, Kabupaten Bantul menjadi contoh keberhasilan penerapan Transparansi keuangan desa yang dikelola melalui sistem keuangan desa oleh Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI.Audit BPK terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Bantul selama tahun 2015-2018 juga menghasilkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dan cukup transparan. Keberhasilan Kabupaten Bantul dalam penerapan transparansi keuangan tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor inilah yang ingin diulas dalam penelitian ini, agar kedepannya bisa dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Studi empiris yang dilakukan oleh Asroel (2016) serta Davici (2018) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah komitmen pimpinan. Menurut Davici (2018), komitmen merupakan penerimaan yang kuat oleh invididu terhadap tujuan dan nilai organisasi, hal ini mencakup cara pengembangan tujuan dan mendahulukan misi organisasi daripada pribadi. Semakin tinggi komitmen seseorang maka akan menciptakan loyalitas dalam kinerjanya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepatuhan akan hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen pemimpin (Asroel, 2016). Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Umaroh (2016). Dalam penelitiannya komitmen pimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kambu (2019) serta Pradita, Karina D, dkk (2019) mengungkapkan bahwa faktor ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi ketidakpastian pada lingkungan SKPD, maka organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan dengan keadaan barunya salah satunya dengan meniru konsep penerapan transparansi pelaporan keuangan pada organisasi yang dianggap berhasil. Sehingga transparansi pelaporan keuangan yang telah diterapkan secara meluas akan berakibat pada lingkungan SKPD yang semakin tidak pasti sehingga SKPD tersebut akan berupaya untuk menghadapi dan melakukan berbagai cara agar lingkungan di sekitarnya tetap stabil (Pradita, Karina D, dkk, 2019). Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisriani (2019). Lisriani (2019) menyimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang dianggap berpengaruh adalah pengendalian internal. Noprizal (2017) serta Wintari dan Suardana (2018) mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Semakin tinggi pengendalian internal, maka penerapan transparansi semakin baik. Pengendalian ini berupa sistem untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan (Wintari dan Suardana, 2018). Sedangkan menurut Wirawan, Reky C dkk (2019), pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi, hal ini dikarenakan dalam penelitiannya penerapan metode penilaian atau pengukuran resiko dan sistem manajemen resiko yang diterapkan masih belum maksimal.

Faktor terakhir yang memengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Kambu (2019) mengemukakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penerapan transparansi. Hal ini berarti semakn tinggi kompetensi SDM, praktik transparansi akan semakin baik. Berbeda dengan Lisriani (2019) dan Wirawan, Reky C, dkk (2019) yang mengungkapkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi. Hasil penelitian Lisriani (2019) mengungkapkan bahwa semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, maka penerapan transparansi semakin rendah. Hal ini memiliki kemungkinan bahwa, Sumber Daya Manusia yang kompeten justru tidak akan menerapkan transparansi pada pelaporan keuangan.

Keberhasilan Kabupaten Bantul dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan dan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Pimpinan, Ketidakpastian Lingkungan, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Bantul)”.**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018; 8), pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan di SKPD Kabupaten Bantul dengan populasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling,* sampel dipilih karena kemudahan peneliti dalam menjangkau sampel (Lubis, NK 2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang berbentuk dinas dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD).Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa ada media perantara. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah responden yang merupakan pegawai keuangan dari setiap sampel yang diteliti.Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan kuesioner.

Variabel – variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Variabel Dependen**

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Transparansi Pelaporan Keuangan. Transparansi adalah Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRP dan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

1. **Variabel Independen**

Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dari variabel tetap dan memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap variabel tetap. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah :

1. **Komitmen Pimpinan (X1)**
2. **Ketidakpastian Lingkungan (X2)**
3. **Pengendalian Internal (X3)**
4. **Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)**

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5 yang mana nilai Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Netral / tidak ada pendapat (N) diberi skor 3, Setuju (S) diberi skor 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

1. Pengujian Kualitas Data
2. Uji Validitas
3. Uji Reliabilitas.
4. Uji Asumsi Klasik
5. Uji Normalitas
6. Uji Multikolinearitas
7. Uji Heterokedastisitas
8. Metode Analisis Data
9. Analisis Regresi Berganda
10. Uji Hipotesis

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel komitmen pimpinan (H1) menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di SKPD kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 0,448 yang lebih kecil dari 1,999 dan koefisien regresi (β) 0,043 yang bernilai positif.Komitmen pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari organisasi itu sendiri. Komitmen pimpinan berarti kemampuan perilaku individu untuk mengedepankan kepentingkan organisasi daripada kepentingan dirinya sendiri.Berkaitan dengan komitmen pimpinan, pada Januari 2019 Bupati dan seluruh kepala SKPD Kabupaten Bantul telah melakukan perjanjian kinerja sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah diamanahkan kepada mereka. Hal ini berarti, pejabat pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya untuk senantiasa meningkatkan komitmennya demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Komitmen pimpinan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dibuktikan dengan optimasi proses input aktivitas dari masing-masing skpd di situs web pemerintah Kabupaten Bantul. Komitmen untuk melaporkan setiap kegiatan di web bertujuan untuk meningkatkan transparansi sehingga menumbuhkan kepercayaan dari masyarakatnya. Diperlukan adanya komitmen pimpinan untuk mendorong aktivitas ini, sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi.Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asroel (2016) serta Davici (2018) yang menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2. **Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel ketidakpastian lingkungan (H2) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di SKPD kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 2,903.Menurut Syarmenda (2018) ketidakpastian lingkungan merupakan situasi dimana seseorang terkendala untuk memprediksi keadaan sekitar sehingga orang tersebut mencoba untuk melakukan sesuatu guna menghadapi ketidakpastian lingkungan tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah akan mensiasati ketidakpastian lingkungan yang terjadi dengan melakukan perbaikan eksternal maupun internal. Sebuah organisasi harus bisa bertahan dari tekanan eksternal untuk bisa bertahan hidup dengan menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik.Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kambu (2019) serta Pradita, Karina D dkk (2019) yang menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

3. **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel Pengendalian Internal (H3) menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di SKPD kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig yang diperoleh yaitu sebesar 0,019 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebear 2,406.Pengendalian internal merupakan bagian dari sistem yang digunakan sebagai porsedur dan pedoman operasional organisasi tertentu. Pengendalian internal bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya organisasi sebagai pencegahan penyimpangan dalam pencapaian tujuan (Hermanto dan Putri, 2018).Pengendalian internal sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional organisasi akan membantu pelaksanaan pencapaian tujuan. Dengan tercapainya tujuan organisasi akan berimbas pada pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya. Sehingga masyarakat akan percaya dengan kinerja pemerintahannya. Sebagai upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah kabupaten Bantul mengadakan akselerasi peningkatan maturitas sistem pengendalian internal pada November 2019. Hal ini berarti, pengendalian internal telah diupayakan dengan baik. Selain itu, dengan tidak ditemukannya kasus korupsi selama beberapa tahun belakangan ini merupakan bukti bahwa pengendalian internal di Kabupaten Bantul tengah dijalankan semaksimal mungkin.Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noprizal (2017) serta Wintari dan Suardana (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

4. **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (H4) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di SKPD kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig yang diperoleh yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebear 3,892.Kinerja sumber daya manusia merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. (Purnama dan Handayani, 2015).Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten diharapkan mampu meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.Kompetensi sumber daya manusia salah satunya bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuhnya. Yang mana bisa dilihat bahwa mayoritas tenaga kerja di Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan lulusan D3, S1 dan seterusnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kambu (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kabupaten Bantul tentang pengaruh Komitmen Pimpinan, Ketidakpastian Lingkungan, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Pengujian Hipotesis (H1) menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2. Hasil Pengujian Hipotesis (H2) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

3. Hasil Pengujian Hipotesis (H3) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

4. Hasil Pengujian Hipotesis (H4) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

**B. SARAN**

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan guna perbaikan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah : Dalam rangka meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, pemerintah Kabupaten Bantul perlu meningkatkan komitmen bersama khususnya untuk komitmen para pimpinan dalam setiap SKPD, karena komitmen pimpinan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan mencapai tujuan organisasi.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
3. Penelitian ini hanya dilakukan di 19 dinas dan 1 BKAD, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutya bisa memperluas wilayah penelitian sehingga menghasilkan responden yang lebih banyak lagi.
4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel-variabel lain yang dirasa mempengaruhi penerapantransparansi pelaporan keuangan, sehingga bisa diketahu faktor-faktor lain yang berpengaruh.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afriani, R. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Faktor Politik Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai). JOM FEB, Vol 1, Edisi 1.

Andriyani, L. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya kepemimpinan, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Pada SKPD Kabupaten Pelalawan). JOM Fekon Vol.3 No.1.

Anggraini, R. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai). JOM Fekon, Vol.4 No.2 .

Asroel, R. B. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). JOM Fekon Vol. 3 No. 1.

Davici, N. (2018). "Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan dan Faktor Politik terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 1-20.

Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas Skpd Pemerintah Kota Padang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Hermanto, S. B., & Putri, E. M. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja. Konferensi Regional Akuntansi V, Malang.

JATI, P. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kambu, A. (2019). Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmena Manajemen dan Kualitas Aparat Kampung Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintahan Kampung Di Kabupaten Boven Digoel). Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, 61-81.

Lisriani, N. (2019). Pengaruh Tekanan Eksernal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris di BPKD Kabupaten Klaten).SKRIPSI. FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN.

Lubis, NK. (2017). Pengaruh Tekanan Ekserna, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), Vol 1, No.1, 62-71

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mukti, G. B. (2018). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal dan Komitmen Manjamen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakart. SKRIPSI. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

Noprizal, R. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen Dan Sistem Pengendalian Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintahdaerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 , 1066-1080.

Nur, S. (2019, Juli 25). timesindonesia. Dipetik April 10, 2020, dari https://www.timesindonesia.co.id/read/news/222148/pemkab-bantul-lucurkan-aplikasi-sidat-keuda-untuk-transparansi-anggaran

Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah:Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. Jurnal TECHNOBIZ Vol. 3, No. 5, 25-30.

Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap penerapan transparansi Pelaporan Keuangan. ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 2, 87-100.

Putra, B. M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal). SKRIPSI. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADYAH YOGYAKARTA.

Rahayuningtyas, D. P., & Setyaningrum, D. (2017). PENGARUH TATA KELOLA DAN E-GOVERNMENT TERHADAP KORUPSI. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 1, Nomor 4, 431 – 450.

Romandiyah, W. S. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Akuntabilitas, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo.

Saingura, H., & Purnomo, E. P. (2018). Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta. ResearchGate.

Sari, F. M. (2017). Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan LSM Algheins Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo.

SETYOWATI, D. F. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Sumber Daya Manusia, Komitmen Manajemen, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sugiyanto. (2019, Januari 16). Tribunnews.com. Dipetik April 2020, 9, dari https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/16/dinilai-sukses-jalan-sistem-keuangan-desa-bantul-jadi-contoh-transparansi-keuangan-desa

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Syarmenda, A. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan Dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekon Vol .3 No.1 .

Umaroh, U. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan dan Kompetensi SDM Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). JOM Fekon Vol.4 No.1, 178-192.

Wintari, K. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan Dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 747-774.

Wirawan, R. C., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2019). Anteseden Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang). Wahana Riset Akuntansi, Vol. 7, No 2, 1551-1566.

Yesnita, M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Bukittinggi). JOM Fekon Vol.3, No.1.

Yunaz, A. R. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). JOM Fekon Vol.3,No.1.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Dipetik April 9, 2020, dari https://yogyakarta.bpk.go.id/hp-lkpd/

Dipetik April 7, 2020, dari http://www.bpkp.go.id/diy/konten/1857/Mitra-Kerja.bpkp

Redaksi, P. (2020, Maret 1). Kabarkota.com. Dipetik April 11, 2020, dari https://kabarkota.com/jcw-kerugian-negara-akibat-korupsi-di-diy-capai-rp-23-1-miliar/

Transparency International;. (t.thn.). Dipetik April 4, 2020, dari https://www.transparency.org/

Transparency International. (t.thn.). Dipetik April 6, 2020, dari https://www.transparency.org/cpi2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 60 Tahun 2008 Yang MengaturTentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lembaran Negara RI Tahun 2008.Sekretariat Negara. Jakarta.

www.bantulkab.go.id